BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Piutang negara merupakan bagian dari keuangan negara yang dalam hal ini merupakan hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 pada pasal 1 ayat 1, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan/ pengelolaan piutang negara negara diatur dalam PMK 163/PMK.06/2020 pada Pasal 5 ayat 1 yang kegiatannya meliputi penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

Piutang negara yang merupakan hak pemerintah perlu dikelola secara optimal khususnya dalam hal penyelesaiannya guna meningkatkan penerimaan negara disektor PNBPN. Pembayaran piutang negara merupakan kewajiban yang mengikat bagi seluruh debitur baik perorangan maupun yang berbentuk badan hukum. Pembayaran piutang termasuk dalam lingkup kegiatan penyelesaian dan diatur dalam PMK 163/PMK.06/2020. Penyelesaian meliputi pelunasan yang termasuk pelunasan dengan keringanan, penghapusan (secara bersyarat/ mutlak setelah

diurus optimal), dan pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi pencatatan.

Ditengah upaya pengoptimalan pengurusan piutang negara yang dilakukan pemerintah, pada awal tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi virus COVID-19 dan terus berlanjut hingga akhir tahun 2021. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perubahan dan penyesuaian diberbagai sektor termasuk pada sektor pemerintahan. Salah satu dampak COVID-19 di sektor pemerintahan adalah pada penyelesaian piutang negara dalam bentuk pelunasan. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi tersebut serta dalam rangka percepatan penyelesaian piutang negara dan untuk memperingan penanggung utang di masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan perubahan pengaturan penyelesaian piutang ditengah pandemi COVID-19 melalui mekanisme pelunasan dengan keringanan yang disebut *crash program*. Pengaturan terkait *Crash program* dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/ Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program*.

Pelaksanaan *crash program* merupakan tugas dari DJKN yang tidak terlepas dari tanggung jawab atas pengelolaan Piutang Negara, namun secara teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh KPKNL sebagai instansi vertikal dari DJKN. Salah satu KPKNL yang melaksanakan program tersebut adalah KPKNL Surabaya. Berdasarkan definisi yang tertera dalam PMK 15/PMK.06/2021 Pasal 1 ayat 2, *crash program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan

hukum atas Piutang Negara. Pemberian keringanan utang berupa *crash program* yang sangat menguntungkan pemegang utang direpson positif oleh para debitur yang memiliki utang pada negara. Hal tersebut juga terjadi di KPKNL Surabaya yang diketahui memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup besar di Jawa Timur, maka diduga KPKNL Surabaya menerima permintaan keringanan utang dari para debitur yang lebih banyak dari KPKNL lain di Provinsi Jawa Timur.

Permohonan keringanan utang melalui mekanisme *crash program* diajukan oleh debitur baik perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum kepada KPKNL Surabaya. Permohonan keringanan utang disampaikan oleh pemegang utang hingga batas waktu tanggal 1 Desember 2021, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PMK 15/PMK.06/2021 pasal 7 ayat 1. Menanggapi hal tersebut, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang pelaksanaan *crash program* pada badan hukum yang diselenggarakan oleh KPKNL Surabaya sepanjang tahun 2021. Tinjauan dan pengumpulan data akan dilakukan berdasarkan kegiatan pelaksanaan *crash program* yang dilaksanakan di KPKNL Surabaya. Selanjutnya, hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam bentuk penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul "TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BADAN HUKUM MELALUI MEKANISME *CRASH PROGRAM* DI KPKNL SURABAYA".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian piutang melalui mekanisme *crash program* pada badan hukum di KPKNL Surabaya?

2. Apa saja kendala yang dihadapi KPKNL Surabaya selama proses pelaksanaan penyelesaian piutang melalui mekanisme *crash program* pada badan hukum?
3. Apa saja upaya yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya dan alternatif solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian piutang melalui mekanisme *crash program* pada badan hukum?
4. Bagaimana contoh pelaksanaan *crash program* badan hukum yang telah diselesaikan oleh KPKNL Surabaya?

1.3 Tujuan Penilaian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian piutang melalui mekanisme *crash program* pada badan hukum di KPKNL Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KPKNL Surabaya selama proses pelaksanaan penyelesaian piutang melalui mekanisme *crash program* pada badan hukum.
3. Untuk mengetahui upaya dan alternatif solusi yang diberikan serta dilakukan oleh KPKNL Surabaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan penyelesaian piutang melalui mekanisme *crash program* pada badan hukum.
4. Untuk mengetahui contoh riil pelaksanaan *crash program* pada badan hukum yang telah diselesaikan di KPKNL Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis menetapkan batasan hanya pada aspek bahasan tertentu, hal tersebut bertujuan untuk memfokuskan penulisan pada pokok bahasan tertentu. Aspek batasan penulisan tersebut meliputi:

1. Lokasi

Ruang lingkup lokasi yang diambil penulis terbatas pada pelaksanaan *crash program* pada wilayah kerja KPKNL Surabaya.

2. Sektor

Ruang lingkup sektor yang dibahas dalam KTTA ini terbatas pada pelaksanaan *crash program* pada badan hukum.

3. Periode

Periode pelaksanaan dan pengambilan data terbatas pada pelaksanaan mekanisme *crash program* di sepanjang tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada badan hukum melalui mekanisme *crash program* secara keseluruhan dan mendetail, serta mengetahui urgensi pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Karya tulis ini menyajikan data dan juga fakta secara jelas dan terstruktur sehingga penulis dapat mengimplementasikan serta mengembangkan ilmu yang didapatkan selama menjalani perkuliahan di PKN STAN.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Karya tulis ini dapat dijadikan petunjuk dalam menemukan solusi atas kendala dikemudian hari, memperbaiki ketidaksempurnaan penulisan maupun penyesuaian terkait perubahan kondisi atau peraturan dikemudian hari yang menyebabkan metode dan pembahasan dalam karya tulis ini sudah dianggap tidak relevan.

c. Bagi pemerintah

Karya tulis ini dapat menjadi panduan KPKNL pada wilayah kerja yang lain (selain KPKNL Surabaya) yang mengalami kondisi yang sama seperti rumusan masalah pada karya tulis ini, sehingga dapat menemukan pandangan terkait tindak lanjut yang relevan.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data serta informasi yang relevan dan lengkap untuk menunjang penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini berupa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk verbal dan bukan angka.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2016: 225) adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pihak pengumpul data. Sedangkan menurut Husein Umar (2013:42) yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dari individu, contohnya berupa hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Untuk itu dalam penulisan KTTA ini sumber data primer didapatkan penulis secara langsung dari KPKNL Surabaya berupa wawancara secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2016: 225) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya didapatkan melalui pihak lain atau dari dokumen. Ditambahkan oleh Hasan (2002 :58) bahwa data sekunder merupakan data yang dapat digunakan untuk mendukung informasi primer dan dapat didapatkan dari bahan Pustaka, literatur, buku, dan lain sebagainya. Sehingga data sekunder dalam KTTA ini berasal dari jurnal, publikasi pemerintah, dokumen pada arsip KPKNL Surabaya, dan peraturan pemerintah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut P. Joko Subagyo yang dikutip dalam (Mutiara Ayu Banjarsari, H. Irwan Budiman, 2015) adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Sedangkan menurut Sugiyono yang dikutip dalam

jurnal yang sama (Mutiara Ayu Banjarsari, H. Irwan Budiman, 2015) wawancara merupakan tempat bertemunya dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam KTTA ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa pegawai yang berwenang menangani pelaksanaan *crash program* pada badan hukum di lingkungan KPKNL Surabaya. Berikut ini tabel rencana narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis untuk mendapatkan informasi terkait. Jumlah informan akan bertambah seiring berjalannya waktu menggunakan metode *snowball sampling* hingga mendapatkan informasi secara lengkap.

Tabel I. 1 Daftar Rencana Narasumber

No	Kode	Jabatan
1.	Narasumber A	Staf Seksi Piutang Negara KPKNL Surabaya
2.	Narasumber B	Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Surabaya
3.	Narasumber C	Kepala Kantor KPKNL Surabaya

b. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut Sugiyono (2005:83) adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dari wawancara dalam penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Bungin (2007:121) yang dikutip dalam (Nilamsari, 2014) metode dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dalam penulisan KTTA ini, pengumpulan data melalui studi dokumen didapatkan penulis dari

penelusuran dokumen historis objek penulisan yang telah terdokumentasi dengan baik di KPKNL Surabaya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut M Iqbal (2002:29) merupakan Teknik pengumpulan data yang mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat ditemukan melalui buku-buku atau hasil penelitian pihak lain. Sedangkan menurut Sugiyono yang dikutip dalam (Jamaludin, 2018) adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang sedang berkembang pada saat penelitian dilakukan. Dalam KTTA ini studi kepustakaan dilaksanakan melalui penelusuran dari jurnal pendukung, peraturan dan publikasi pemerintah, atau sumber lain yang mendukung penulis dalam melengkapi informasi pendukung.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN LULUS UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori/ ketentuan yang relevan dengan topik bahasan dan digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tinjauan terhadap objek penulisan. Penulis akan memaparkan landasan teori yang meliputi pengertian piutang negara, ruang lingkup pengelolaan piutang negara, dan dasar pelaksanaan mekanisme *crash program*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode apa saja yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan landasan teori yang dibahas pada bab II, akan menjadi dasar-dasar yang akan dibahas pada bab III. Penulis akan membahas terkait pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada badan hukum melalui mekanisme *crash program* di KPKNL Surabaya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan penulis berdasarkan tinjauan pada bab-bab sebelumnya dan juga penulis memberikan saran yang berguna dalam hal perbaikan kekurangan yang ada.